

Nama : Muhammad Zinedine Yazid Zidane Sirgar

Npm : 2210031087

Tugas Ekonomi Industri

a) Petani cabai di Jawa Barat

Indonesia memiliki berbagai sektor industri dengan karakteristik struktur pasar yang beragam. Di sektor pertanian, seperti petani cabai di Jawa Barat, struktur pasar yang berlaku mendekati persaingan sempurna. Hal ini karena terdapat ribuan petani yang memproduksi komoditas homogen tanpa kemampuan untuk memengaruhi harga pasar. Harga cabai ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga petani bertindak sebagai price taker. Kelebihan struktur ini adalah efisiensi alokatif dan harga yang cenderung mencerminkan biaya produksi, sehingga konsumen memperoleh harga relatif murah. Namun di sisi lain, kelemahannya terletak pada posisi tawar petani yang lemah, fluktuasi harga yang tinggi, serta ketimpangan informasi pasar yang menyebabkan sebagian besar keuntungan dinikmati oleh tengkulak atau perantara. Akibatnya, meskipun konsumen diuntungkan, kesejahteraan **petani justru rentan terhadap perubahan harga dan cuaca.**

b) PT PLN (Persero) sebagai penyedia listrik nasional

Berbeda dengan sektor pertanian, PT PLN (Persero) beroperasi dalam struktur monopoli alami, karena penyediaan listrik memerlukan investasi infrastruktur besar, seperti jaringan transmisi dan distribusi, yang tidak efisien bila digandakan oleh banyak perusahaan. Monopoli ini memberikan keuntungan berupa skala ekonomi yang tinggi, koordinasi infrastruktur yang terpusat, serta kestabilan pasokan listrik secara nasional. Namun, monopoli juga memiliki kelemahan seperti potensi inefisiensi, kurangnya inovasi, dan harga yang bisa lebih tinggi dibanding kondisi kompetitif apabila tidak diawasi dengan baik. Dalam konteks kesejahteraan konsumen, monopoli menimbulkan risiko berkurangnya surplus konsumen karena adanya kekuatan pasar yang terlalu besar di tangan satu pelaku usaha. Oleh karena itu,

regulasi harga dan pengawasan kualitas layanan menjadi hal yang sangat penting agar monopoli tetap melayani kepentingan publik.

c) Gojek dan Grab dalam sektor transportasi online

Sementara itu, sektor transportasi online di Indonesia didominasi oleh dua perusahaan besar, Gojek dan Grab, yang mencerminkan struktur oligopoli duopoli. Kedua perusahaan bersaing melalui inovasi layanan, strategi harga, dan efek jaringan, di mana semakin banyak pengguna dan mitra yang bergabung, semakin besar pula nilai platform tersebut. Struktur pasar ini memiliki keunggulan dalam hal inovasi dan efisiensi dinamis, karena persaingan antarperusahaan mendorong pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas layanan. Akan tetapi, oligopoli juga memiliki kelemahan, seperti potensi praktik anti-kompetitif, perang harga sementara yang menekan kesejahteraan mitra pengemudi, serta ketergantungan masyarakat terhadap dua platform besar yang menguasai data dan jaringan pengguna. Jika dibiarkan tanpa regulasi, kekuatan pasar keduanya bisa menimbulkan dominasi jangka panjang yang mengurangi pilihan konsumen.

Sebagai penasihat ekonomi pemerintah, kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketimpangan pasar di sektor transportasi online adalah dengan memperkuat regulasi persaingan. Pemerintah perlu memastikan agar tidak ada praktik eksklusivitas antara platform dengan mitra pengemudi, membuka interoperabilitas data sehingga reputasi dan rating pengemudi dapat berpindah antarplatform, serta melakukan audit algoritma untuk menjamin transparansi sistem penentuan tarif dan pembagian pendapatan. Selain itu, perlindungan sosial bagi pengemudi juga harus diperkuat, misalnya melalui jaminan sosial, standar upah minimum, atau kontribusi bersama antara platform dan pemerintah. Kebijakan ini sejalan dengan teori ekonomi pasar persaingan monopolistik dan teori kesejahteraan yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar.

Dalam sektor kelistrikan, kebijakan yang direkomendasikan adalah penerapan regulasi tarif berbasis insentif (price-cap regulation) agar PLN tetap efisien tanpa menaikkan harga secara berlebihan. Pemerintah juga dapat membuka kompetisi terbatas pada bidang pembangkitan listrik dengan memberi izin kepada produsen swasta atau energi terbarukan untuk menjual listrik ke jaringan PLN melalui mekanisme third-party access. Kebijakan subsidi sebaiknya bersifat tepat sasaran, misalnya dalam bentuk tarif lifeline bagi rumah tangga miskin, sehingga

efisiensi tetap terjaga namun aspek keadilan sosial juga terpenuhi. Penguatan lembaga regulator independen sangat diperlukan agar kebijakan tarif dan investasi dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Adapun mengenai kemungkinan sektor pertanian berubah dari persaingan sempurna menjadi **oligopoli** di masa depan, hal itu sangat mungkin terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan konsolidasi rantai pasok. Misalnya, ketika perusahaan besar atau platform digital menguasai jalur distribusi dan pemasaran hasil pertanian, maka kendali harga dan pasokan dapat berpindah ke tangan segelintir pelaku. Proses ini dapat terjadi melalui sistem kontrak pertanian (contract farming), integrasi vertikal oleh perusahaan agribisnis, atau dominasi platform pemasaran digital yang menimbulkan efek jaringan seperti yang terjadi di sektor transportasi online. Jika tidak diatur dengan baik, perubahan ini dapat menurunkan kesejahteraan petani karena posisi tawar mereka melemah di hadapan perusahaan besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan **koperasi petani**, memperluas akses terhadap informasi harga dan pasar, serta memastikan transparansi dalam kontrak pertanian. Dengan demikian, transformasi struktur pasar dapat diarahkan menuju efisiensi tanpa mengorbankan kesejahteraan produsen kecil.

Secara keseluruhan, ketiga struktur pasar tersebut menunjukkan dinamika ekonomi Indonesia yang kompleks. Persaingan sempurna di sektor pertanian menghasilkan efisiensi harga tetapi rawan ketimpangan pendapatan; monopoli di sektor listrik menjamin stabilitas pasokan namun perlu regulasi ketat agar tidak merugikan konsumen; sedangkan oligopoli transportasi online mendorong inovasi namun berpotensi mengurangi kompetisi jangka panjang. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengatur sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial demi tercapainya kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.